

# DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DAN DINASTI DI INDONESIA: Menuju Politik yang Ideal Melalui Eksplorasi Teori Masalah

Arif Sugitanata<sup>1</sup>, Muh. Rizal Hamdi, L Hendri Nuriskandar<sup>3</sup>, Nurman Jayadi<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Wonosobo, Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

<sup>4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email Koresponden: [arifsugitanata@gmail.com](mailto:arifsugitanata@gmail.com)

Email :Muhrizal@gmail.com

## ABSTRACT

This research aims to explore the dynamics of identity politics and dynasties in Indonesia and efforts to present ideal politics. This study uses a literature review, adopts a qualitative research approach, and applies descriptive analysis techniques based on Maslahah's theory. The results show that identity politics and dynasties play a significant role in the formation of power, often relying on ethnic, religious, or family identity to mobilise support, which can increase the representation of certain groups but also trigger polarisation and erode the principles of democracy and meritocracy. The interaction between identity politics and dynasties creates complexities in political dynamics that can hinder the achievement of an ideal politics based on democracy, justice and equality. On the other hand, efforts towards ideal politics in Indonesia must involve a strong commitment to the principles of democracy, justice and equality, strengthening the foundations of inclusive and participatory democracy, ensuring free and fair elections, and building political awareness and political education among the people. Eradicating corruption, collusion, and nepotism is also a top priority in creating clean politics and integrity. In addition, nurturing diversity and pluralism is an essential step in creating a more inclusive and democratic society. A Maslahah theory-based analysis also emphasises the achievement of the common good and the prevention of harm, which are essential in guiding Indonesia towards ideal politics. It includes empowering individuals and groups in society, promoting social justice, and maintaining social harmony. As such, this study makes an essential contribution to the understanding of identity and dynastic politics in Indonesia and the steps needed to achieve a more equitable and inclusive politics.

**Keywords:** Dynamics, Identity Politics, Dynasty, Indonesia, Maslahah

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dinamika politik identitas dan dinasti di Indonesia dan upaya dalam menghadirkan politik ideal. Menggunakan studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dan teknik analisis deskriptif berlandaskan teori masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, politik identitas dan dinasti memainkan peran signifikan dalam pembentukan kekuasaan, seringkali mengandalkan identitas etnis, agama, atau keluarga untuk memobilisasi dukungan, yang dapat meningkatkan representasi kelompok tertentu tetapi juga memicu polarisasi dan mengikis prinsip demokrasi dan meritokrasi. Interaksi antara politik identitas dan dinasti menciptakan kompleksitas dalam dinamika politik yang dapat

menghambat pencapaian politik ideal berdasarkan demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Di sisi lain, upaya menuju politik yang ideal di Indonesia harus melibatkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan, memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan partisipatif, memastikan pemilihan umum yang jujur dan adil, serta membangun kesadaran politik dan pendidikan politik di kalangan masyarakat. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menjadi prioritas utama dalam menciptakan politik yang bersih dan berintegritas. Selain itu, memelihara keberagaman dan pluralisme merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis. Analisis berbasis teori masalah juga menekankan pada pencapaian kebaikan umum dan pencegahan kemudharatan, menjadi penting dalam membimbing Indonesia menuju politik yang ideal. Ini mencakup pemberdayaan individu dan kelompok dalam masyarakat, mempromosikan keadilan sosial, dan memelihara harmoni sosial. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang politik identitas dan dinasti di Indonesia serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai politik yang lebih berkeadilan dan inklusif.

**Kata Kunci:** Dinamika, Politik Identitas, Dinasti, Indonesia, Masalah

Article history: Received : 01/04/2022 Approved : 06/06/2022	<b>STIS Darussalam Bermi</b> <a href="https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar">https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar</a>
--	---

## Pendahuluan

Dinamika politik identitas<sup>1</sup> dan dinasti<sup>2</sup> di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk diteliti, mengingat kompleksitas dan pengaruhnya terhadap struktur politik dan sosial di negara ini. Kedua aspek tersebut seringkali saling terkait dan berpengaruh dalam menentukan arah dan dinamika politik di Indonesia. Dalam praktiknya, politik identitas dan dinasti seringkali mengandalkan penggunaan identitas—baik itu berbasis keluarga, etnis, maupun agama—sebagai sarana untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan bagi demokrasi di Indonesia, termasuk isu keadilan, representasi politik, dan kesetaraan dalam akses terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, menghadapi politik identitas dan dinasti, tentunya membutuhkan berbagai strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi politik identitas dan politik dinasti masih terjadi di beberapa daerah, yaitu di Solo, Medan, Tangerang Selatan, dan Kalimantan Tengah.<sup>3</sup> Selain itu, politik dinasti bukanlah fenomena baru di Indonesia dan telah berlangsung sejak era pra-reformasi, dengan pergeseran lokus dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah pasca

---

<sup>1</sup> Dina Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia," *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (2019): 12–16.

<sup>2</sup> Djoni Gunanto, "Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 8, no. 2 (2020): 177–91.

<sup>3</sup> Aunil Ukhra, Yana Syafriyana Hijri, and Ifan Taufikurrohman, "Isu Politik Identitas Dan Dinasti Politik Dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021): 350–61.

reformasi.<sup>4</sup> Lebih lanjut, selain perkembangan politik dinasti, politik identitas juga mengalami penguatan di wilayah lokal bersamaan dengan proses desentralisasi politik di Indonesia, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.<sup>5</sup>

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang dinamika politik identitas dan dinasti di Indonesia. selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi cara-cara efektif dalam mengatasinya, serta mengidentifikasi bagaimana teori masalah dapat diintegrasikan ke dalam praktik politik untuk menciptakan kondisi yang lebih ideal. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman dan pengembangan politik di Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggambarkan sebuah eksplorasi yang mendalam terhadap dinamika politik identitas dan dinasti yang memengaruhi Indonesia secara signifikan. Dengan fokus yang cermat, penelitian ini menyelidiki tidak hanya fenomena tersebut, tetapi juga strategi untuk mengatasi dampak negatifnya. Dalam menguraikan permasalahan yang mendasar, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik analisis-deskriptif. Sumber data utamanya adalah buku dan jurnal-jurnal yang relevan, memberikan landasan yang kokoh untuk temuan-temuan yang dihasilkan.

Melalui analisis mendalam, penelitian ini mencapai tiga temuan pokok yang mempertanyakan dan mencoba menjawab esensi politik Indonesia. Pertama, dinamika politik identitas dan dinasti yang telah memengaruhi lanskap politik di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bagaimana identitas politik, terutama yang berkaitan dengan garis keturunan politik, telah menjadi elemen kunci dalam pembentukan kekuasaan di Indonesia. Kedua, penelitian ini menyoroti upaya untuk melawan politik identitas dan dinasti tersebut. Dengan mengidentifikasi strategi-strategi yang efektif, penelitian ini membuka jalan bagi diskusi tentang bagaimana masyarakat dan pemimpin dapat merespons tantangan tersebut dengan lebih efektif. Ketiga, penelitian ini mengeksplorasi teori masalah sebagai landasan untuk membangun politik ideal di Indonesia. Dengan memperkenalkan konsep-konsep teoritis yang relevan, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang memungkinkan untuk membayangkan solusi yang lebih baik. Dengan memanfaatkan pisau bedah teori masalah, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika politik Indonesia. Analisis yang cermat dan pendekatan yang terstruktur memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas politik Indonesia serta memberikan landasan untuk pembahasan lebih lanjut tentang reformasi politik yang substansial dan berkelanjutan.

### **Hasil dan Pembahasan**

---

<sup>4</sup> Farida Azzahra and Indah Fitriani Sukri, "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi," *JAPHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 105–19.

<sup>5</sup> Muhtar Haboddin, "Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal," *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, no. 1 (2012): 116–34.

## Dinamika Politik Identitas dan Dinasti di Indonesia

Politik identitas dan politik dinasti merupakan dua fenomena yang menonjol dalam panggung politik Indonesia, yang masing-masing memiliki karakteristik dan dampak yang unik terhadap struktur sosial dan politik negara.<sup>6</sup> Politik identitas di Indonesia seringkali terkait dengan penggunaan identitas etnis, agama, atau kelompok sosial tertentu sebagai alat untuk menggalang dukungan politik. Fenomena ini terutama terlihat dalam pemilihan umum, di mana calon dan partai politik cenderung menonjolkan identitas tertentu untuk memenangkan hati pemilih yang memiliki kesamaan identitas.<sup>7</sup> Hal ini mencerminkan keragaman yang luas di Indonesia, yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan kelompok budaya.<sup>8</sup> Politik identitas bisa berdampak positif dalam mewakili kepentingan kelompok tertentu, namun juga berpotensi memicu polarisasi dan konflik antarkelompok.<sup>9</sup>

Di sisi lain, politik dinasti merujuk pada praktik di mana kekuasaan politik cenderung diwariskan dalam keluarga atau antaranggota keluarga tertentu. Fenomena ini terlihat dari banyaknya individu dalam satu keluarga yang menduduki posisi politik strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional.<sup>10</sup> Kehadiran politik dinasti dapat diinterpretasikan sebagai indikator kuatnya pengaruh keluarga dan relasi personal dalam politik Indonesia.<sup>11</sup> Meskipun praktik ini bisa meningkatkan efisiensi dan stabilitas politik melalui transfer pengetahuan dan pengalaman politik antargenerasi, politik dinasti juga sering dikritik karena memperlemah demokrasi dan meritokrasi, serta membatasi kesempatan politik bagi individu di luar lingkaran dinasti tersebut.<sup>12</sup>

Interaksi antara politik identitas dan politik dinasti di Indonesia menciptakan dinamika politik yang kompleks.<sup>13</sup> Di satu sisi, politik identitas dapat dimanfaatkan oleh keluarga politik dinasti untuk memperkuat basis dukungan mereka dengan menonjolkan identitas tertentu yang resonan dengan pemilih. Di sisi lain, politik dinasti dapat mempengaruhi konstelasi politik identitas dengan cara mempengaruhi representasi kelompok-kelompok tertentu dalam struktur kekuasaan politik. Kedua fenomena ini, ketika berinteraksi, dapat mempengaruhi jalannya demokrasi di Indonesia, menggarisbawahi pentingnya mekanisme yang mendorong inklusivitas dan transparansi dalam politik untuk memastikan bahwa sistem politik mampu melayani kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya kelompok atau keluarga tertentu saja.<sup>14</sup>

---

<sup>6</sup> Ukhra, Hijri, and Taufikurrohman, "Isu Politik Identitas Dan Dinasti Politik Dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020."

<sup>7</sup> Leli Salman Al-Farisi, "Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila," *Aspirasi* 10, no. 2 (2020): 77–90.

<sup>8</sup> Arif Sugitanata et al., "Building Harmony In Diversity: Exploring Masnun Tahir's Perspective on Multicultural Fiqh," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (2023): 47–57.

<sup>9</sup> Paulus Sugeng Widjaja, Djoko Prasetyo Adi Wibowo, and Imanuel Geovasky, "Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 6, no. 1 (2021): 95–126.

<sup>10</sup> Muhammad Taher Siregar, M Arif Nasution, and Marlon Sihombing, "Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara," *PERSPEKTIF* 10, no. 2 (2021): 678–91.

<sup>11</sup> Joko Suryono et al., "Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Dinasti Di Indonesia," vol. 1, 2018, 67–73.

<sup>12</sup> Muchsin Al-Fikri et al., "Politik Dinasti Dalam Perspektif Komunikasi Politik," *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi)* 4, no. 2 (2023): 156–62.

<sup>13</sup> Ukhra, Hijri, and Taufikurrohman, "Isu Politik Identitas Dan Dinasti Politik Dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020."

<sup>14</sup> Gun Gun Heryanto, *Problematika Komunikasi Politik* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 216–574.

Kedalaman dan kompleksitas hubungan antara politik identitas dan politik dinasti di Indonesia menggambarkan bagaimana kedua fenomena tersebut saling mempengaruhi dan berkontribusi pada dinamika kekuasaan politik. Politik identitas, dengan penekanannya pada kesetiaan berbasis etnis atau agama, sering kali menjadi sarana bagi keluarga dinasti untuk memperkuat legitimasi mereka dalam mata pemilih. Ini terjadi melalui strategi yang sengaja dirancang untuk mengeksploitasi kesadaran kelompok dan identitas kolektif, sehingga menciptakan lingkungan di mana dukungan politik menjadi sangat tergantung pada aspek-aspek identitas tersebut.<sup>15</sup>

Pada saat yang sama, prevalensi politik dinasti di Indonesia menunjukkan adanya pengakuan dan penerimaan terhadap praktik pewarisan kekuasaan sebagai bagian dari kultur politik. Hal ini menciptakan situasi di mana akses ke arena politik sering kali terbatas pada mereka yang memiliki koneksi keluarga, mengurangi peluang bagi aktor-aktor baru yang mungkin memiliki ide segar dan perspektif berbeda.<sup>16</sup> Keberadaan politik dinasti bisa memperkuat ikatan identitas tertentu dalam politik, mengingat keluarga-keluarga dinasti cenderung mengkonsolidasikan dukungan mereka melalui penggunaan simbol, narasi, dan kebijakan yang resonan dengan basis identitas mereka.<sup>17</sup>

### **Menuju Politik Ideal di Indonesia: Melawan Politik Identitas dan Dinasti**

Fenomena politik identitas dan politik dinasti telah menjadi dua isu penting yang mempengaruhi dinamika politik nasional. Kedua fenomena ini, jika tidak ditangani dengan bijaksana, dapat menghambat perjalanan menuju politik yang ideal, yang seharusnya berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Penanganan fenomena politik identitas dan politik dinasti memerlukan pendekatan yang komprehensif, salah satunya dengan menggaukan politik yang ideal untuk Indonesia. Menuju politik yang ideal untuk Indonesia adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kebijaksanaan, keteguhan hati, dan partisipasi aktif dari semua elemen bangsa. Konsep politik ideal tersebut haruslah berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesetaraan, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa.<sup>18</sup> Politik ideal untuk Indonesia harus memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat secara luas, bukan hanya segelintir individu atau kelompok. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Francis Fukuyama, *Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition* (London: Profile books, 2018), Chapter 1-14.

<sup>16</sup> Azzahra and Sukri, "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi."

<sup>17</sup> Etha Pasan, "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Presiden Di Filipina Tahun 2001–2011," *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* 1, no. 3 (2018): 2001–2011.

<sup>18</sup> Arif Sugitanata, "MEMILIH PEMIMPIN NEGARA YANG RESPONSIF DAN PROGRESIF: Urgensi, Dampak Dan Tantangan Di Era Globalisasi," *Madani: Journal of Social Sciences and Social Science Education* 2, no. 1 (2024): 1–13.

<sup>19</sup> Eko Prasetyo and Arif Sugitanata, "Urgensi Penerapan Good Governance Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022): 67–90.

Rakyat harus diberi akses yang luas terhadap informasi dan diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.<sup>20</sup>

Selanjutnya, penguatan lembaga-lembaga demokrasi merupakan langkah penting lainnya.<sup>21</sup> Lembaga-lembaga ini, seperti DPR, MPR, dan lain-lain, harus benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat, bukan sebagai alat untuk kepentingan politik sempit. Mereka harus mampu bekerja secara efektif dan efisien, mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya.<sup>22</sup> Pemilihan umum yang jujur dan adil adalah salah satu kunci utama dalam proses ini, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa adanya intimidasi atau manipulasi.<sup>23</sup> Di sisi lain, penting juga untuk membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat. Pendidikan politik yang baik akan membantu warga negara untuk lebih memahami hak dan kewajibannya, serta mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses politik.<sup>24</sup> Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, serta pemanfaatan media massa dan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi yang akurat dan konstruktif. Peran media dan teknologi informasi juga sangat krusial dalam membangun kesadaran publik. Media dapat berfungsi sebagai alat pendidikan dan pemberi informasi yang objektif, membantu masyarakat membuat keputusan politik yang lebih matang. Teknologi informasi, termasuk media sosial, dapat menjadi platform untuk dialog antarkelompok, memperkuat solidaritas nasional di tengah keberagaman.<sup>25</sup>

Menuju politik yang ideal membutuhkan komitmen kuat untuk melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemberantasan praktik-praktik tidak sehat ini harus menjadi prioritas utama, karena mereka merupakan hambatan terbesar dalam pencapaian politik yang bersih dan berintegritas. Hal ini memerlukan kerjasama erat antara pemerintah, lembaga pengawas, dan seluruh elemen masyarakat.<sup>26</sup> Dalam konteks yang lebih luas, politik ideal juga berarti mendorong dan memelihara keberagaman dan pluralisme. Indonesia, dengan keberagaman etnik, agama, dan budayanya, memerlukan pendekatan politik yang inklusif dan menghargai perbedaan. Keberagaman harus dianggap sebagai kekayaan yang dapat memperkuat ikatan sosial dan memperkaya proses demokrasi.<sup>27</sup> Oleh karena itu, kebijakan dan program yang mendukung toleransi, dialog antar kelompok, dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas sangat penting untuk diterapkan. Harapan ke depannya adalah terciptanya sinergi antara

---

<sup>20</sup> Siti Fadila Siregar et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Penyusunan Peraturan Daerah," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 7877–90.

<sup>21</sup> Erla Sharfina Permata Noor, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Demokrasi Di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 679–93.

<sup>22</sup> Munif Rochmawanto, "Pembagian Kekuasaan Antara MPR, DPR, Dan DPD Dalam Mewujudkan Sistem Ketatanegaraan Yang Berkedaulatan Rakyat," *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2014): 1–12.

<sup>23</sup> Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 02 (2019): 252–61.

<sup>24</sup> Adena Nurashiah Siregar, "Pendidikan Politik Sebagai Wujud Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Kaum Milenial Dalam Pemilu Serentak 2024," *Jurnal Generasi Ceria Indonesia* 1, no. 2 (2023): 103–8.

<sup>25</sup> Lilik Sumarni, "Pemilu 2024 Dalam Agenda Media: Antara Simulakra, Hiperealitas, Dan Kekuasaan Oligarki," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 4843–64.

<sup>26</sup> Sjahruddin Rasul, "Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 3 (2009): 538–53.

<sup>27</sup> Arif Sugitanata and Muannif Ridwan, "Menuju Keluarga Yang Harmonis: Manajemen Konflik Politik Dalam Keluarga Di Tengah Perbedaan Pilihan Politik," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 1 (2024): 67–74.

pemerintah dan masyarakat dalam membangun negara. Masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa memainkan peran penting dalam menjaga pemerintah agar tetap transparan dan akuntabel. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah benar-benar mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat.<sup>28</sup>

Dalam mencapai politik yang ideal, Indonesia perlu terus berupaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan stabilitas politik. Dengan demikian, politik tidak hanya akan menjadi arena perdebatan kekuasaan tetapi lebih kepada wadah untuk membangun konsensus nasional dan meraih kemajuan bersama. Menghadapi tantangan yang dihadapi tidak sedikit, namun dengan tekad dan kerja keras bersama, impian tentang politik yang ideal untuk Indonesia bisa menjadi kenyataan. Akan tetapi, langkah-langkah ke depan dalam konteks politik Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa tersebut untuk menavigasi antara tradisi dan kebutuhan akan pembaruan politik yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warganya guna menuju politik yang ideal.

### **Eksplorasi Teori Masalah Menuju Politik Ideal di Indonesia**

Fenomena politik identitas dan politik dinasti,<sup>29</sup> jika tidak dikelola dengan bijak, berpotensi menimbulkan kerusakan atau kemudharatan, seperti polarisasi sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan. Kedua fenomena ini dapat menghambat tercapainya politik ideal yang berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Melalui lensa teori masalah mengungkapkan bagaimana upaya menuju politik ideal di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip masalah, yang menekankan pada pencapaian kebaikan umum, pencegahan kemudharatan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Teori masalah, yang merupakan konsep dalam hukum Islam, menilai tindakan berdasarkan manfaat dan mudaratnya terhadap masyarakat.<sup>30</sup> Dalam konteks politik Indonesia, pendekatan ini menawarkan wawasan tentang bagaimana politik ideal dapat dicapai melalui beberapa aspek kunci.

Nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesetaraan yang diutamakan dalam pencarian politik ideal<sup>31</sup>, yang mencerminkan prinsip masalah dalam memaksimalkan manfaat bagi semua warga negara. Dengan memberikan setiap individu hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, negara menegaskan komitmen terhadap kesejahteraan kolektif dan pencegahan diskriminasi atau pengucilan sosial.<sup>32</sup> Selain itu,

---

<sup>28</sup> Anissa Nur Silvia and Rita Myrna, "Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik," *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2023): 1–9.

<sup>29</sup> Ukhra, Hijri, and Taufikurrohman, "Isu Politik Identitas Dan Dinasti Politik Dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020."

<sup>30</sup> Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014): 311–28.

<sup>31</sup> Prasetyo and Sugitanata, "Urgensi Penerapan Good Governance Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia."

<sup>32</sup> Rizki Priandi and Kholis Roisah, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 106–16.

transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan adalah prinsip utama dalam teori masalah untuk mencegah kemudharatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan akses luas terhadap informasi,<sup>33</sup> pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan dan programnya mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat, serta menjaga integritas proses demokrasi.<sup>34</sup>

Kemudian, penguatan lembaga-lembaga demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil adalah langkah penting untuk memastikan representasi yang efektif dan efisien dari keinginan rakyat.<sup>35</sup> Ini sesuai dengan konsep masalah dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis, di mana keputusan dibuat berdasarkan kepentingan publik dan bukan kepentingan sempit kelompok atau individu tertentu. Lebih lanjut, membangun kesadaran politik dan pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka, sekaligus mendorong partisipasi yang lebih besar dalam proses demokrasi.<sup>36</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip masalah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan individu dan kelompok dalam masyarakat. Pemberantasan korupsi dan memelihara keberagaman dan pluralisme juga mencerminkan prinsip masalah dalam mencegah kemudharatan dan mempromosikan kebaikan kolektif.<sup>37</sup> Dengan menghargai perbedaan dan menganggap keberagaman sebagai kekayaan yang memperkuat ikatan sosial, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.<sup>38</sup>

Secara keseluruhan, dari perspektif teori masalah menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam mencapai politik ideal di Indonesia, yang tidak hanya fokus pada aspek teknokratis dan mekanisme demokrasi, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan harmoni dalam masyarakat. Melalui tekad bersama dan upaya yang berkelanjutan, impian tentang politik yang ideal—di mana kebaikan kolektif diletakkan di atas kepentingan sempit—dapat menjadi kenyataan.

## Kesimpulan

Secara keseluruhan, artikel ini menyajikan fenomena dominan dalam politik Indonesia, yaitu politik identitas dan politik dinasti, serta dampak terhadap pencapaian politik yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Politik identitas di Indonesia sering kali menggunakan identitas etnis, agama, atau kelompok sosial untuk mendapatkan dukungan politik, yang dapat mewakili kepentingan kelompok tertentu tetapi juga berpotensi

---

<sup>33</sup> Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata, and Fawwaz Elmurtadho, "Juridical Analysis of Public Information Disclosure in Government Systems in the Digital Era," *Constitution Journal* 2, no. 2 (2023): 1–18.

<sup>34</sup> Bambang Martin Baru, Sripeni Rusbiyanti, and Retno Iswati, "Bunishing Bureaucracy System Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)," vol. 3, 2021, 607–20.

<sup>35</sup> Sumardi Sumardi, "Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024," *Journal of Government Insight* 2, no. 2 (2022): 210–20.

<sup>36</sup> Siregar, "Pendidikan Politik Sebagai Wujud Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Kaum Milenial Dalam Pemilu Serentak 2024."

<sup>37</sup> Aisyah Chairil and Arif Sugitanata, "MAQASHID ASY-SYARI'AH REVIEW ON FORMER CORRUPTION CONVICTS AS PROSPECTIVE LEGISLATIVE MEMBERS," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 19, no. 2 (2022): 299–323.

<sup>38</sup> Suud Sarim Karimullah and Arif Sugitanata, "The Government's Strategies for Promoting Religious Tolerance in a Multicultural Society," *Journal of Religious Policy* 2, no. 1 (2013): 75–102.

memicu polarisasi dan konflik antarkelompok. Sementara itu, politik dinasti mengacu pada pewarisan kekuasaan politik dalam keluarga, yang dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas politik melalui transfer pengetahuan antargenerasi, namun sering dikritik karena mengikis prinsip demokrasi dan meritokrasi serta membatasi peluang bagi individu di luar lingkaran dinasti. Interaksi antara politik identitas dan politik dinasti menciptakan dinamika politik yang kompleks dan dapat mempengaruhi jalannya demokrasi di Indonesia.

Upaya menuju politik yang ideal di Indonesia harus melibatkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan, memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan partisipatif, memastikan pemilihan umum yang jujur dan adil, serta membangun kesadaran politik dan pendidikan politik di kalangan masyarakat. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menjadi prioritas utama dalam menciptakan politik yang bersih dan berintegritas. Selain itu, memelihara keberagaman dan pluralisme merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis. Dalam konteks ini, teori masalah, yang menekankan pada pencapaian kebaikan umum dan pencegahan kemudharatan, menjadi penting dalam membimbing Indonesia menuju politik yang ideal. Ini mencakup pemberdayaan individu dan kelompok dalam masyarakat, mempromosikan keadilan sosial, dan memelihara harmoni sosial. Tekad bersama dan upaya berkelanjutan diperlukan untuk mencapai politik yang ideal, di mana kebaikan kolektif diutamakan di atas kepentingan sempit, mencerminkan sebuah masyarakat demokratis yang sehat dan inklusif.

## Daftar Pustaka

- Al-Farisi, Leli Salman. "Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila." *Aspirasi* 10, no. 2 (2020): 77–90.
- Al-Fikri, Muchsin, Fauzi Ismail, Siti Nurjanah, and Rifki Rosyad. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Komunikasi Politik." *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi)* 4, no. 2 (2023): 156–62.
- Arif Sugitanata and Muannif Ridwan. "Menuju Keluarga Yang Harmonis: Manajemen Konflik Politik Dalam Keluarga Di Tengah Perbedaan Pilihan Politik." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 1 (2024): 67–74.
- Asmawi, Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014): 311–28.
- Azzahra, Farida, and Indah Fitriani Sukri. "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi." *JAPHTN-HAN* 1, no. 1 (2022): 105–19.
- Baru, Bambang Martin, Sripeni Rusbiyanti, and Retno Iswati. "Bunishing Bureaucracy System Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)," 3:607–20, 2021.
- Chairil, Aisyah, and Arif Sugitanata. "MAQASHID ASY-SYARI'AH REVIEW ON FORMER CORRUPTION CONVICTS AS PROSPECTIVE LEGISLATIVE MEMBERS." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 19, no. 2 (2022): 299–323.
- Fukuyama, Francis. *Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition*. London: Profile books, 2018.

- Gunanto, Djoni. "Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 8, no. 2 (2020): 177–91.
- Haboddin, Muhtar. "Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal." *Jurnal Studi Pemerintahan* 3, no. 1 (2012): 116–34.
- Heryanto, Gun Gun. *Problematika Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Karimullah, Suud Sarim, and Arif Sugitanata. "The Government's Strategies for Promoting Religious Tolerance in a Multicultural Society." *Journal of Religious Policy* 2, no. 1 (2013): 75–102.
- Karimullah, Suud Sarim, Arif Sugitanata, and Fawwaz Elmurtadho. "Juridical Analysis of Public Information Disclosure in Government Systems in the Digital Era." *Constitution Journal* 2, no. 2 (2023): 1–18.
- Lestari, Dina. "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia." *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (2019): 12–16.
- Noor, Erla Sharfina Permata, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Demokrasi Di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 679–93.
- Pasan, Etha. "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Presiden Di Filipina Tahun 2001–2011." *Jurnal Hubungan Internasional Interdependence* 1, no. 3 (2018): 222–35.
- Prasetyo, Eko, and Arif Sugitanata. "Urgensi Penerapan Good Governance Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2022): 67–90.
- Priandi, Rizki, and Kholis Roisah. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 106–16.
- Rasul, Sjahruddin. "Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 3 (2009): 538–53.
- Rochmawanto, Munif. "Pembagian Kekuasaan Antara MPR, DPR, Dan DPD Dalam Mewujudkan Sistem Ketatanegaraan Yang Berkedaulatan Rakyat." *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2014): 1–12.
- Santoso, Rudi. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 02 (2019): 252–61.
- Silvia, Anissa Nur, and Rita Myrna. "Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no. 1 (2023): 1–9.
- Siregar, Adena Nurashiah. "Pendidikan Politik Sebagai Wujud Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Kaum Milenial Dalam Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Generasi Ceria Indonesia* 1, no. 2 (2023): 103–8.
- Siregar, Muhammad Taher, M Arif Nasution, and Marlon Sihombing. "Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara." *PERSPEKTIF* 10, no. 2 (2021): 678–91.
- Siregar, Siti Fadila, Ranti Nadila, Nurisa Hsb, and Feri Rinaldi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Penyusunan Peraturan Daerah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 7877–90.

- Sugitanata, Arif. “MEMILIH PEMIMPIN NEGARA YANG RESPONSIF DAN PROGRESIF: Urgensi, Dampak Dan Tantangan Di Era Globalisasi.” *Madani: Journal of Social Sciences and Social Science Education* 2, no. 1 (2024): 1–13.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, Siti Khamidatus Sholikhah, and Siti Aminah. “Building Harmony In Diversity: Exploring Masnun Tahir’s Perspective on Multicultural Fiqh.” *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 2 (2023): 47–57.
- Sumardi, Sumardi. “Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024.” *Journal of Government Insight* 2, no. 2 (2022): 210–20.
- Sumarni, Lilik. “Pemilu 2024 Dalam Agenda Media: Antara Simulakra, Hiperealitas, Dan Kekuasaan Oligarki.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 4843–64.
- Suryono, Joko, Purwani Indri Astuti, Nuryani Tri Rahayu, and Hariyanto Hariyanto. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Politik Dinasti Di Indonesia,” 1:67–73, 2018.
- Ukhra, Aunil, Yana Syafriyana Hijri, and Ifan Taufikurrohman. “Isu Politik Identitas Dan Dinasti Politik Dalam Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2021): 350–61.
- Widjaja, Paulus Sugeng, Djoko Prasetyo Adi Wibowo, and Imanuel Geovasky. “Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 6, no. 1 (2021): 95–126.